Agustus, 2025, Volume 7 Nomor 2
E-ISSN 2656-1026

PERAN MEDIA MASSA TERHADAP SOSIAL LEARNING MASYARAKAT DALAM PEMILU (STUDI KASUS PADA SURAT KABAR KALTENG POST)

Betty Karya
Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
Email : betykarya@gmail.com
Fauzi Rahman
Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
Email : fauzi05@gmail.com

Abstrak

Dalam perkembanganya Media Masa merupakan sebuah instrument besar dalam menyokong perkembangan bangsa ini. Peran media masa sebagai sarana penyampaian informasi kepada masayrakat sangatlah penting. Dalam perkembanganya media masa bukan sekadar saran informasi namun juga mampu menjalankan fungsi lainya sebagai sarana *Social Learning*. Mengingat bahwasanya media masa merupakan instrumen dalam merangsang pikiran masayarakat untuk bersikap medalam menyikapi sebuah fenomena.

Penelitian ini melihat bagaimanan peran Kalteng Postsebagai media lokal untuk melaksanakan *Social Learning*. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif.

Pemilihan umum merupakan sebuah fenomena penting yang harus disikapi dan memerlukan proses sosialisasi yang baik. Mengingat bahwasanya pemilu adalah sebuah momentum dimana masayarakat menyalurkan aspirasi melalui para wakilnya 5 tahun kedepan. Disinilah media masa bermain dan menjalankan peranya untuk menyampaikan informasai sekaligus memberikan social Learning pada masyarakat. Salah satu media masa yang melakukanya adalah media masa cetak seperti Surat Kabar.

Social Learning dilaksanakan oleh media cetak dengan melakukan perimbangan dalam pemberitaanya, dimana berita mengenai pelaksanaan pemilu diikuti dengan himbauan oleh pihak pelaksana. Seringkali aspek pemberitaan terjebak dalam kemelut kepentingan serta selera pasar. Hambatan ini muncul mengingat bahwa surat kabar merupakan sebuah produk dari badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dari besaran penjualan produk mereka. Masyarakat yang lebih cenderung menyukai hal-hal populis ini memaksa surat kabar untuk memberitan pemberitaan yang populis pula. Sering kali berita berisi sosialisasi atau himbauan kurang disukai atau dibaca oleh masyarakat, sehingga proses *Social Learning* mengalami hambatan. Disisi lain berbagai kepentingan masuk dalam pemberitaan masyarakat.

Kata kunci : Media Massa, Social Learning, Pemilu

Pendahuluan

Media massa sebagai perangkat sosialisasi yang paling berpengaruh, memiliki peran efektif berkenaan dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik. Namun seringkali yang terjadi dengan posisi dan peran media massa tersebut disalahgunakan oleh berbagai kepentingan yang melatar belakangi. Karena peran efektif media massa tersebut pada akhirnya media massa menjadi begitu penting bagi pemerintah atau politisi. Media massa menjadi tidak independen dan sarat dengan tunggangan kepentingan politis dari para elit. Blumler menyatakan dalam Haryatmoko (2007:81), perebutan akses ke media merupakan perjuangan penuh persaingan untuk mempengaruhi dan mengontrol persepsi rakyat terhadap peristiwa politik kunci dan masalah yang terjadi dalam negara demokrasi di antara politisi atau juru bicara dari berbagai kepentingan yang menginginkan untuk mempertajam kebijakan.

Perkembangan era komunikasi yang semakin dinamis, menyebabkan sosialisasi program oleh instansi pemerintah harus dimaknai sesuai dengan perkembangan iklim masyarakat yang semakin demokratis dan transparan. Suatu usaha sosialisasi dapat dikatakan berhasil apabila antara masyarakat dan instansi pemerintah yang bersangkutan terjadi saling pengertian yang harmonis. Untuk memperoleh dukungan masyarakat dan menciptakan iklim saling pengertian dapat ditempuh melalui komunikasi (Siswanto, 1992:48)

Jean Baudrillard, pakar media asal Perancis, meyakini bahwa media merupakan perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam persoalan. Lebih lanjut ia memaparkan, "*Apa yang kita anggap sebagai realitas*, sejatinya adalah pandangan media terhadap isu tersebut. Bisa dikatakan, realitas bisa terwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan banyaknya media dan gambar. Dengan kata lain, simbol realitas telah menggantikan realitas itu sendiri. "

Seperti apa yang dikemukakan oleh Baudrilard bahwa media memegang peranan penting dalam mengendalikan sebuah narasi besar kehidupan masyarakat opini akan sebuah fenomena dibentuk.

Fenomena program dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah seringkali mengalami ketidaksinergisan dengan kesadaran masyarakat. Padahal sebagai obyek serta pihak yang sangat berkepentingan terhadap manfaat pembangunan, masyarakat adalah ukuran dari sukses atau tidaknya suatu kebijakan atau pembangunan yang dicanangkan. Dalam hal ini, salah satu unsur kegagalan pemerintah dalam menerapkan beberapa kebijakannya adalah, lemahnya bentuk sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pihak masyarakat, tentang pemahaman akan kebijakan itu sendiri. Dalam era demokrasi dan tranparansi ini, maka pihak pemerintah dalam melakukan komunikasi kepada khalayak masyarakat harus lebih persuasif dan efektif dan mengena pada sasaran dari kebijakan tersebut. Dari kebutuhan tersebutlah yang kemudian pihak pemerintah harus lebih memaksimalkan sisi humas dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Pemilihan Umum tahun 2009 merupakan moment besar dalam menyongsong masa depan bangsa. Disini peran aktif rakyat dalam memilih wakilnya di legislatif dan presiden untuk lima tahun mendatang. Prosesi pemilihan secara langsung merupakan pemilu langsung ke dua setelah pemilu tahun 2004. Dari sekian kalinya pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi di masyarakat bukanlah sebuah peningkatan kesadaran publik dalam menggunakan hak suara sebagai sebuah representasi sikap politik

maupun keberpihakanya, tetapi terjadi penurunan kesadaran publik. Disinilah peran kehumas yang ada pada pemerintah dan media berperan dalam peningkatan partisipasi publik.

Peran humas pemerintah menjadi sangat signifikan berkaitan dengan adanya berbagai macam kebijakan pemerintah yang kurang maksimal diaplikasikan di masyarakat. Hal ini dilatari oleh adanya fungsi komunikasi dan informasi yang kurang memadai, serta tingkat persuasif yang diberikan kurang mendorong atau memberikan pemahaman kepada khalayak masyarakat. Pihak pemerintah, baik dari tingkatan nasional, propinsi, kotamadya/kabupaten sampai dengan aparat desa, pada dasarnya adalah institusi yang melayani masyarakat. Dari semangat tersebut maka karakter instansi pemerintah tidak lagi berpaku pada wewenang atau birokratis dalam melakukan proses komunikasi kepada khalayak masyarakat.

Pada dasarnya media massa memiliki implikasi yang luas dan bersifat ambigu. Di satu sisi, media dapat menjadi kepanjangan tangan penguasa ketika regulasi tentang pemberitaan berada dalam cengkraman negara yang bersikap sebagai polisi. Di sisi lain, media dituntut untuk menjadi sumber informasi, sarana sosialisasi, pendidikan dan pendewasaan politik bagi masyarakat. Media massa mempunyai kecenderungan selektif dalam menurunkan pemberitaan namun pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya terkadang tidak rasional. Politisasi informasi sebagai akibat dependensi media pada penguasa dan pemilik modal menyebabkan media tidak mampu menjalankan fungsi pengawasannya. Di lain pihak, media massa seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, alat memperjuangkan kepentingannya dan hak-hak politiknya. Tetapi, hal itu tidak menutupi kenyataan bahwa sesungguhnya media memiliki idealisme, meskipun idealisme ini seringkali bertarung dengan kepentingan pasar ketika pertimbangan kapitalistik ikut. Dalam hal ini media juga berperan sebagai instrument dalam *social leraning*, dimana media harus memberikan pengetahuan akan pentingnya menyalurkan aspirasi dalam pemilu.

Keterlibatan media dalam pemilihan umum memang tak dapat dipungkiri lagi. Banyak aspek dalam pemilu yang melibatkan media masa terutama media cetak. Hal ini dikarenakan pemilu kali ini dengan sistem perolehanan suara terbanyak, memaksa para calon anggota legislatif menggunakan iklan sebagai sarana kampanye untuk menarik banyak pemilih. Selain itu peerubahan cara pemungutan suara dari coblos menjadi contreng memerlukan bentuk sosialisasi menyeluruh pada masyarakat karena pandangan masyarakat akan cara pemilihan adalah dengan mencoblos.

Dengan adanya perubahan sistem pemilu ini pers memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemilu. Baik sebagai media kampanye para calon serta media sosialisasi dan pembelajaran pada masyarakat. Namun selain peran umum itu pers juga memiliki peran bagi *social learning* masyarakat mengenai pemilu. Di tengah perubahan sistem pemilihan umum terdapat beberapa kendala lain yang harus dihadapi. Ancama golput dalam pemilu 2019 cukup tinggi ditengarai banyaknya masyarakat yang sudah tidak lagi percaya pada pemerintah.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001;3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitiatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemberitaan Media Dalam Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyikapan Masalah Pemilu.

Ketika pemilu legislatif 2019 dijalankan banyak sekali perubahan di dalam proses pelaksananya, dimulai dari perubahan model penandaan pada kertas suara. Dahulu kita mencoblos kertas suara dan sekarang adalah dengan mencontreng, selain itu pada proses perhitungan pun juga berubah dimana dulu berdasarkan nomor urut sekarang beralih kepada suara terbanyak. Perubahan-perubahan ini tentunya akan membawa dampak besar pada pola pikir masyarakat.

Berbagai perubahan ini telah membawa suatu bentuk baru dari proses pembelajaran masyarakat, bila dahulu hanya menggunakan baliho atau sekadar poster, kini dengan keadaan masyrakat yang haus akan informasi maka peran media masa semakin mencolok. Salah satu peran utama adalah proses pembelajaran masyarakat atau *Social Learning*. Proses ini merupakan penciptaan kondisi dimana masyarakat mampu mengikuti apa yang dianjurkan atau dibawa oleh media masa tersebut. Para pembaca dibuat untuk mengikuti apa yang di citrakan oleh media. Seperti apa yang diungkap oleh ketua KPU Kota Palangka Raya yang menyatakan *"keberadaan media masa memang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu kali ini, sebab banyak perubahan dalam sistem pemilu sekarang dibanding tahun lalu. Disini media sebagai pemberi informasi sekaligus mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan pemilu"*.

Bukan hanya itu saja yang dihadapi oleh masyarakat, berbagai macam masalah menyelimuti pelaksanaan pemilu 2019 mulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai telatnya logistik pemilu. Berbagai masalah ini tentunya akan mebawa perubahan besar kepada image masyarakat atas pelaksanaan pemilu 2019. Menurut penuturan Ketua KPU kota Palangka Raya tentang "*permasalahan DPT merupakan kesalahan dari kordinasi antara berbagai intansi terkait dalam pendataan peserta pemilu bukan kesalahan KPU semata"*.

Pemberitaan mengenai DPT dalam Kalteng Postmemang cukup banyak, hanya saja pemberitaan mengenai pemasalahan DPT tidak menyeluruh pada Kota Palangka Raya tetapi pada tiap kabupaten-kabupaten.

Permasalahan DPT memang salah satu tantangan besar yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Keberadaan DPT ganda atau namyaknya DPT yang tidak valid menjadikan pendapat masyarakat akan jalannya pemilupun semakin buruk. Perihal keberadaan DPT yang masih kacau juga dibenarkan oleh pihak KPU, seperti yang diuraikan oleh Ketua KPU Palangka Raya *"memang keberadaan DPT yang kacau banyak ditemukan namun kita juga melakukan perbaikan dalam hal ini. Oleh Karena itu kita berharap media memberitakanya secara proporsional agar masyarakat percaya akan penyelenggaraan pemilu ini serta tetap turut serta dalam upaya perbaikan didalamnya"*.

Menyikapi apa yang diutarakan oleh KPU pihak Kalteng Postjuga mengiyakan bahwa media masa terutama Kalteng Post tetap memberikan pemberitaan yang proporsional terkait masalah DPT, bukan hanya pada aspek kerusakan saja tetapi juga pada perbaikanya Bukan hanya itu pemberitaan tentang pembaharuan DPT ini juga terus dilakukan, begitu juga di kabupaten lain seperti yang terjadi di Palangka Raya

Ditambah lagi kepercayaaan masyarakat yang mulai turun kepada Pemerintahan.Berbagai kendala ini tentunya memerlukan sebuah bentuk pemberitaan yang mampu membawa kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu media masa memegang peranan penting dalam proses Pembelajaran Masyarakat (*Social Learning*).

Pemberitaan mengenai DPT menajdi prioritas dalam proses ini seperti yang dikatan oleh Pimpinan Redaksi Kalteng Post" *sebenarnya apa yang menurut kami menjadi hal pokok dalam pemberitaan adalah penyampaian informasikan serta dijadikan satu pemicu bagi masyarakat agar masyarakat mengerti serta berproses didalamnya. Seperti kita ketahui selama pemilu 2019 banyak muncul permasalahan mengenai DPT, kami beranggapan bahwa masyarakat harus dipicu agar tanggap dan mau turu tserta berproses dalam perbaikanya. Secara langsung inilah proses pembelajaran masyarakat. Kita tahu masyarakat kita sudah cukup cerda namun terkadang kurangnya informasi membuat masyarakat pasif dan tidak melakukan apapun ketika mengetahui adanya sebuah permasalahan. Harapan kami yang utama adalah masyarakat datang dan ikut melakukan chek atas Hak pilihnya"*. Apa yang diuraikan oleh Pimpinan Kalteng Post tersebut merupakan gambaran bahwa *social learning* memang dilakukan oleh Kalteng Posthanya saja masih dalam lingkup perbaikan DPT.

2. Proses Social Learning Oleh Kalteng Post.

Pemanfatan media dalam *social learning* adalah sebuah proses dimana media masa menciptakan produk (pemberitaan atau acara) dalam hal ini media masa cetak tentunya berupa pemberitaan. Berita ini dimuat tentunya bukan saja untuk memberikan informasi tetapi juga sebagai sebuah produk dari surat kabar. Berita dalam surat kabar tentunya bukan sembarang berita selain memiliki nilai jual juga memuat beberapa hal lain, diantaranya adalah pemuatan proses *social learning.* Dimana berita ditujukan untuk menciptakan masyarakat agar mampu mengimitasi atau meniru apa yang ada di dalam berita. Proses ini juga dilaksanakan oleh Kalteng Postdalam melakukan pemberitaan selam jalannya pemilu 2019. Bentuk-bentuknya adalah dengan mengeluarkan halaman yang beritanya di fokuskan pada jalannya pemilu 2019.

Mengapa Kalteng Post yang tergabung dalam Jawa Pos grup ini meluncurkan halaman khusus pemilu mengingat bahwa Jawa Pos sebagai induk Kalteng Post merupakan koran yang didirikan dengan kepentingan meliput pemilu tahun 1982. Dengan sejarah yang dimiliki oleh Koran Jawa Pos maka dirasa perlu adanya peran serta dalam pemberitaan maupun proses pendidikan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2009. Jawapos bukan sekadar melakukan pemberitaan nasional tapi juga pemberitaan yang lebih ter focus pada

daerah dengan meberikan beberapa halaman untuk berita lokal daerah dengan nama Kalteng Post , untuk wilayah Karesidenan Palangka Raya dinamakan Kalteng Post.

Proses sosialisasi serta pendidikan massa atau *Social Learning* dilakukan oleh pihak Kalteng Postmerupakan sebuah rangkaian dengan proses pemberitaan mengenai jalannya pemilu untuk Karesidenan Palangka Raya. Pemberitaan Kalteng Postditujukan untuk memberikan informasi mengenai jalanya pemilu di Palangka Raya sedangkan rangkaian *social learning* menjadi dengan satu dengan jalanya pemberitaan. Himbauan dari pihak terkait juga masuk dalam pemberitaan. Hal ini dilakukan agar peran berita bukan hanya sebagai sumber info semata tetapi juga bisa mempengaruhi para pembaca untuk terlibat dalam proses pemilu ini. Pernyataan pihak Kalteng Post menyatakan*"bisa dikatakan bahwa pemberitaan pada Kalteng Postbukan pemberitaan mengenai kondisi pemilu semata, tetapi pemberitaan ini memiliki esensi agar masyarakat turut serta dalm pemilu. Dengan menyebutkan harapan serta himbauan dari pihak terkait seperti KPU merupakan gambaran bahwa social learning juga di jalankan disini"*.
Prosedur pemberitaanya pun tak hanya mencantumkan kondisi faktual dilapangan saja, tetapi juga dengan perimbangan jumlah berita serta dicantumkanya beberapa himbauan dari penyelenggara yaitu KPU. Pilihan ini memang menjadi sebuah tanggung jawab Kalteng Postterhadap tugasnya yaitu sebagai sarana informasi serta edukasi terhadap masyarakat agar mengerti dan terlibat jalanya pemilu sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik. Penjabaran dari salah satu wartawan Kalteng Post*"dalam pemberitaan kita bukan hanya mengenai kondisi lapangan semata tetapi juga disisipkan himbauan dari penyelenggara pemilu mengenai keterlibatan dari masyarakat, ini adalah bentuk perimbangan berita dari pihak Kalteng Postmengenai social learning pemilu"*.

Hambatan Dalam Proses Social Learning

1. **Hambatan pelaksanaan Social Learning terkait pemilu dari dalam tubuh media Kalteng Post**

Dalam pelaksanaan proses social leraning pemilu melalui media masa pada dasanya bnyak sekali hambatan yang terjadi. Beberapa pokok hambatan yang muncul menurut wartawan Kalteng Post*"munculnya permasalahan dalam proses pembelajaran kepada masyarakat adalah ketikat kepentingan yang di bawa oleh pihak Kalteng Post sebagai sebuah badan usaha dengan banyaknya berita yang muncul di masyarakat, artinya pemberitaan akan lebih memilih pada berita yang memiliki nilai jual tinggi bukan pada berita yang memiliki unsur sosialisasi"*. Pernyataan ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seringkali *social leraning* mengalami hambatan dari pihak media sendiri, mengingat pemilihan berita akan membawa dampak pada jumlah oplah serta nilai jual surat kabar tesebut.

Hambatan ini memang dirasakan oleh pihak Kalteng Post tetapi mereka juaga berusaha melaksanakan perannya dalam *social learning* dengan memunculkan pemberitaan serta himbauan dari pihak KPU mengenai perlunya peran serta masyarakat. Bila dilihat memang secara fungsi telah terpenuhi hanya saja ada beberapa pemberitaaan mengenai

sosialisasi yang sering kali tidak masuk rubric utama dikarenakan nilai berita yang dirasa tidak menjual. Pernyataan wartawan Kalteng Post mengenai masalah hambatan internal selalu dikarernakan pada nilai berita.

2. Hambatan pelaksanaan Social Learning terkait pemilu dari luar tubuh media Kalteng Post

Dalam pemberitaan mengenai proses sosialisasi sebenarnya sudah diatur oleh undang-undang bahwa pemberitaan harus seimbang. Namun pada pelaksanaan dilapangan pemberitaan masih sangat tergantung dengan kondisi wartawan serta kebijakan editor apakah pemberitaan ini masuk dalam kategori berita yang layak terbit atau tidak. Proses pemberitaan mengenai sosialisasi sebenarnya sudah banyak dimuat dalam Kalteng Posthanya saja kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memang lebih memilih berita yang sensasional dari pada mengenai sosialisasi. Hal demikian senada dengan pangungkapan pihak Kalteng Post yang diwakili oleh editornya bahwa *"pemberitaan mengenai sosialisasi sudah cukup banyak, namun kembali pada masyarakat mereka kurang membaca berita yang bersifat hibauan atau berisikan masalah jalanya pemilu dan harus disikapi. Masyarakat lebih memilih berita yang sensasional atau sudah cukup banyak mereka ketahui seperti kampanye artis atau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu"*.

Media cetak atau pers memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat dengan ini media berusaha menciptakan masyarakat agar mengikuti apa yang digambarkan oleh media masa tersebut. Oleh karena itu pemberitaan media masa mengenai sosialisasi memang perlu dan pihak Kalteng Post mengungkapkan *"pemberitaan dan sosialisasi melalui iklan atau berita saya rasa cukup berimbang. Tetapi kembali lagi Kalteng Post merupakan organisasi profit dan kita juga tahu masyarakat kita seperti apa. Disini Kalteng Post hanya berusaha membawa semua berita secara berimang dengan tetap mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pihak Jawa Pos Grup"*. Dalam pelaksanaan Kalteng Postberusaha memberikan keseimbangan dalam pemberitaaanya hanya saja selalu ada pemberitaan yang dirasa kurang mengarah pada proses *social learning* dikarenakan kepentingan kepentingan diluar pihak Kalteng Post yang sering kali masuk. Sangat tingginya benturan kepentingan internal maupun eksternal sering mengakibatkan pemberitaan yang kurang pada aspek *social learning* pemilu.

Analisa Pemanfaatan Media Massa Dalam Kegiatan Pemilu

1. Analisa Mengenai Media Sebagai Sarana Kampanye

Salah satu peranan media masa dalam hal ini surat kabar adalah sebagai sarana kampanye. Dalam undang undang pemilihan umum disebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui media masa cetak. Keberadaan media masa saat ini sangat terbuka serta keberadaanya pun sangat banyak, terutama keberadaan media masa di daerah. Hal ini tentunya sangat erat dengan keberadaan konsep desentralisasi. Segala aspek yang terkait dengat peranan daerah tak lagi terkait dengan pusat, demikian juga hubunganya dengan pemilihan umum dimana pemilu bukan sekadar mengenai kepentingan pusat tetapi juga daerah. Pemilu tidak sekadar menjadi kepentingan pusat saja dikarenakan daerah juga melaksanakanya

untuk kepentingan pembentukan struktur legislatif daerah.

Pemilu bukan hanya pesta dari pusat tetapi juga daerah, dikarenakan daerah juga melakukanya. Salah satu hal penting dalam pemilu adalah mengenai kampanye. Kampanye tidak semata mata dilakukan oleh calon dari pusat tetapi juga dilakukan oleh calon yang ada di daerah. Pada dasarnya yang menjadikan perbedaan diantara calon pusat dan daerah adalah karakteristik kampanye. Calon daerah lebih menekankan keberadaan kultur serta kondisi masyarakat yang menjadi objek kampanyenya sedangkan calon pusat akan lebih umum dalam isu yang dibawanya. Calon pada yang ada di daerah pada dasarnya akan membawa aspek-aspek kepentingan daerah dalam kampanyenya. Agenda politik terkait dengan visi serta misi politik calon tak akan jauh dari potensi, kemampuan serta kepentingan daerah.

Isu-isu kepentingan daerah tidak semata-mata muncul dalam bentuk iklan tetapi juga masuk kedalam pemberitaan. Kampanye seperti inilah yang sering dipakai dikarenakan dapat langsung membidik target dari calon tersebut. Dengan demikian Kalteng Postsebagai media cetak lokal yang membawa suara daerah sangat berperan dengan jalanya kampanye calon yang juga membawa isu-isu yang berkembang di daerah.

Apabila kita melihat berita pada data fokus satu maka akan tampak bahwa berita itu punya banyak aspek, punya banyak sisi, dan isinya bukan sekadar informasi yang bebas nilai atau sekadar informasi saja yang ditampilkan. Hal ini karena berita dikemas, sedangkan kemasan berita terkait dengan kepentingan dari sejumlah aktor atau orang yang berada di balik kemunculan berita tersebut. Dalam konteks tersebut, di sini kita melihat perlunya memahami apa yang dinamakan "politik media," yaitu suatu politik yang dimainkan di media massa. Hal ini dikarenakan media memiliki beberapa aktor dibelakangnya. Sedangkan tiga aktor yang bermain di sini adalah: jurnalis (pengelola atau pemilik media), politisi, dan publik atau *audience* dari media bersangkutan. Masing-masing aktor ini memiliki aspirasi dan kepentingan tersendiri. Ada hubungan segitiga antara ketiga aktor utama tersebut. Pertama, jurnalis atau pemilik media. Kepentingan mereka adalah bagaimana menghasilkan berita yang menarik, kuat, atau sensasional jika perlu, demi memperoleh rating tertinggi (untuk media televisi) atau tiras terbesar (untuk media surat kabar atau majalah). Berita yang berhasil meraih penonton, pendengar, atau pembaca terbanyak, diharapkan berimplikasi pada perolehan iklan, pemasukan keuangan, atau profit yang banyak pula.

Selain itu, jurnalis memiliki idealisme pada peran profesinya, sebagai *watchdog* yang mengawasi kekuasaan atau pemerintah, dan melakukan kritik sosial. Independensi pemberitaan dan sikap kritis dipandang sebagai wujud idealisme tertinggi, serta ukuran utama dari kredibilitas profesi jurnalis. Jurnalis umumnya cenderung tidak mau diatur oleh pihak luar dalam masalah pemberitaan.

Kedua, politisi memiliki kepentingan untuk memperjuangkan agenda politiknya. Bila politisi ini seorang calon legislatif (caleg) atau calon presiden (capres), ia berkepentingan untuk membangun popularitas melalui media, agar bisa terpilih dalam pemilu atau pilpres. Jika politisi ini seorang yang sudah memiliki jabatan atau posisi tertentu di pemerintahan, ia ingin memanfaatkan

media bagi sosialisasi agenda politiknya, serta penggalangan dukungan bagi terwujudnya agenda politik tersebut.

Ketiga, publik memiliki kepentingan untuk mengontrol perilaku para politisi, baik yang berkiprah di parlemen, pemerintahan, ataupun bidang-bidang lain, agar menjalankan agenda yang sesuai dengan aspirasi publik. Karena tidak punya akses langsung pada kekuasaan, publik mengharapkan, media dapat menjadi kepanjangan tangan publik dalam menjalankan fungsi kontrol tersebut.

Media massa cetak yang dalam konteks ini dibatasi dalam bentuk surat merupakan sarana komunikasi dan persuasi bagi para praktisi politik, para partisan politik, dan para pemerhati politik. Sebagai sarana komunikasi, media massa cetak tersebut dimanfaatkan untuk mensosialisasikan visi dan misi dari kandidat presiden, memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin berkait dengan program-program jangka panjang dan pendek sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi para kandidat, memberikan liputan dalam kolom reguler maupun kolom khusus berkait dengan kampanye mereka, menyampaikan biografi dan karya-karya para kandidat berikut rencana kerja mereka. Informasi-informasi tersebut dikemas sedemikian rupa dalam aneka bentuk publikasi – liputan berita, liputan khusus, features, analisis, iklan, dan lain-lainnya – sehingga menjadi berguna dan menarik bagi para calon pemilih. Kemasan publikasi dalam media massa cetak seperti ini – baik dalam surat kabar harian maupun dalam majalah mingguan atau dwi-mingguan ataupun bulanan – dimaksudkan sebagai sarana persuasi agar para calon pemilih tertarik, terpikat kepada calon presiden yang disosialisasikan dan dipopularitaskan dalam kampanye tersebut.

Media massa cetak tersebut bisa menarik karena sifatnya yang lama dalam pengertian bahwa informasi yang dipublikasikan tersebut bisa disimpan tanpa harus melakukan '*recording*' sebagaimana dalam media massa siaran; dan kemudian informasi tersebut bisa mudah didapatkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian media massa cetak bukan merupakan media komunikasi, informasi, dan persuasi yang lewat begitu saja sebagaimana yang terjadi dalam media massa siaran baik radio maupun televisi. Di sinilah letak kekuatan media massa cetak.

Hal ini sesuai dengan Hypodermic Needle Theory yang artinya, pesan yang disampaikan oleh media akan langsung mengenai sasarannya yakni para khalayak Sehingga kita tidak dapat menghindar dari terpaan doktrin yang dilakukan oleh media. Teori ini menganggap bahwa kita sebagai khalayak dapat dengan mudah dipengaruhi dan dibentuk sesuai dengan apa yang dingikan oleh media tersebut.

Namun sebaiknya iklan politik itu harus lebih singkat. Karena untuk menghindari kritik dari khalayak atau perlawanan dari sesama aktor politik. Selain itu, jika waktu penayangannya lebih singkat, otomatis iklannya akan lebih efektif dari pada iklan yang panjang.

Peran-peran media dalam komunikasi politik tentu sangat banyak. Dan dalam tulisan ini dikaji empat peran penting media dalam melakukan komunikasi politik. Seperti, Media sebagai alat komunikasi politik, media menjadi sarana untuk melakukan persuasi, memberikan informasi politik pada khalayak, memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk dapat menilai apa yang disampaikan dari media.

Pertama adalah media sebagai komunikasi politik. Dimana para aktor politik membeli dan menggunakan tempat atau spot pada waktu tertentu untuk menyampaikan pesan pada khalayak luas. Media yang digunakan pun bermacam-macam seperti bioskop, *bilboards*, koran, radio, televisi, internet dan masih banyak lainnya. Tujuannya dari iklan politik itu sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari aktor politik tersebut kepada khalayak dan untuk mendapatkan simpati tentunya.

Kedua adalah media dalam hal ini melakukan komunikasi secara persuasi dengan tujuan agar apa yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak. Media memiliki peran penting akan keberhasilan dari aktor politik yang melakukan kampanye. Tujuan dari persuasi tersebut adalah:

a) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang.
b) Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang.
c) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
d) Memperkenalkan etika ,atau menawarkan sistem nilai tertentu.

Ketiga adalah media dapat memberikan informasi pada khalayak. Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting bagi komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Namun iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi memberikan informasi disamping fungsi-fungsi yang lain. Maksudnya adalah media menyampaikan banyak sekali informasi kepada khalayak mengenai apa yang disampaikan oleh para aktor politik dalam iklannya di media. Sehingga masyarakat mengetahui tentang informasi yang mereka butuhkan untuk mengenal sosok dari aktor politik tersebut.

Fungsi yang keempat adalah media memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan aktor politik di media. Sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap pesan yang disampaikan oleh iklan politik di media. Hal ini sesuai dengan teori kritis dan teori kepuasan dan kegunaan. Karena kedua teori itu menggambarkan ke aktifan khalayak dalam memilih, menggunakan dan mengkritisi media. Tentu saja termasuk dalam mengkritisi apa yang disampaikan oleh media.

Jadi dalam fenomena maraknya penggunaan media sebagai sarana komunikasi politik saat ini, pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan peran media sebagai tempat yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Sehingga pesan dari para aktor politik tersebut dapat tersampaikan secara luas dengan lebih efektif.

Studi yang menjelaskan secara detail tentang efek liputan politik media terhadap perilaku belum ada. Namun jika kita memakai paradigma di atas juga dengan efek terbatasnya, maka media dalam pemberitaannya untuk kasus Indonesia mempunyai kekuatan yang besar dan efektif terhadap khalayak. Pemilu legislatif telah berakhir, dan kita telah memperoleh secara resmi hasil pemilu legislatif 2019 setelah KPU mengumumkan secara resmi hasil perhitungan suara manual. Negara yang baru berdemokrasi ternyata mampu menyelenggarakan pemilu langsung untuk kedua kalinya.

Seperti apa yang tampak pada pemberitaan Kalteng Postmerupakan salah satu bentuk dari kampanye, hanya saja pengemasanya yang berbeda tidak dalam bentuk iklan. Hal ini mengingat bahwa teks lebih mudah untuk menggiring opini serta kesadaran dari pemilih untuk memilih. Secara tidak langsung memang pemberitaan ini mengarahkan pada proses penyampaian informasi kepada masyarakat, hanya saja pemberitaan ini juga dapat dikategorikan sebagai kampanye karena adanya unsur menarik perhatian serta ajakan kepada pemilih untuk memilih walaupun hal ini tidak tersurat dalam pemberitaan tersebut.

2. Analisa Mengenai Media Sebagai Saran Informa

Jalanya Informasi merupakan tujuan utama dari media masa, yaitu menyampaikan pesan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam era desentralisasi penyampaian informasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan tanpa adanya peranan dari mereka apa yang dilakukan daerah tentunya tidak akan mendapatkan respon. Salah satu hal penting dari desentralisasi adalah bagaimana masyarakat mengerti akan kondisi daerahnya dan dapat berperan serta dalam jalanya pembangunan ataupun pemerintahan di daerah tersebut. Desentralisasi ditujukan untuk mengembangkan peran serta masyarakat dalam berjalannya pemerintahan daerah. Simpul dari desentralisasi adalah sampainya informasi ke masyarakat. Dengan sampainya informasi kepada masyarakat maka akan muncul umpan balik berupa kritik serta dukungan akan apa yang telah di capai oleh pemerintah daerah. Dari sini berjalanya sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah dapat tercapai.

Demikian pula dengan jalanya pemilu, apa bila tidak ada informasi yang disampaikan tentunya masyarakat tidak akan mengetahui berita atau kondisi berjalanya pemilu dilapangan. Peran Kalteng Postsebgaia suratkabar lokal sangan penting terkait dengan penyampaiaan informasi di daerah. Harapan besar adalah peran serta masyarakat didalam pemilu, mengingat bahwa kemnungkinan untuk munculnya golput (masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya) sangatlah besar. Harapan terbesar dari penyampaian informasi ini adalah peran serta masyarakat dalam pemilu serta menghindari munculnya golput.

Melihat fenomena Pemilu 2019 merupakan sebuah momentum bersejarah dalam liputan di Indonesia. Tidak hanya karena banyaknya partai yang ikut pemilu tetapi juga munculnya berbagai partai baru masih mewarnai pemilu pada tahun 2019. Setelah pemilu legislatif, Indonesia juga menantikan pemilihan presiden langsung. Hal ini yang menjadikan pemberitaan pada Pemilu 2019 menjadi menarik selain dikarenakan varian berita yang banyak juga karena adanya berbagai masalah yang menyelimuti Pemilu 2019.

Bila melihat pemberitaan seharusnya tidak hanya merespon agenda kampanye tiap partai tetapi juga menghadirkan sebuah penyajian yang rapi dan lengkap. Presentasi baik di media cetak yang mencakup semua aspek dari pemilu serta menyodorkan berbagai laporan yang memberikan informasi lengkap kepada pemilih sebelum memutuskan sikap politiknya. Media seharusnya mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dan berimbang meski tidak menutup kemungkinan, karena pemilik media juga ikut terjun dalam partai akan ada ada

sistem pelaporan yang menonjolkan sebuah partai di satu sisi, tetapi bisa juga dijadikan semacam alat yang kritis menilai partai yang lain, yang bertentangan atau bersaingan dengan pemilik modal.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, Pers menempati posisi yang kuat. Dengan sendirinya dunia pers, mempunyai kekuatan sebagai refleksi wujud wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus terjamin.

Selain itu, Pers juga sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam UU No 40 tahun 1999 tenntang Pers.

Berkait dengan Fungsi pers dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers sudah jelas, bahwa pers mengemban fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial yang tertera pada pasal 3 ayat 1. Sementara berkait dengan peranan pers, dalam pasal 6 UU 40/1999, sudah jelas, bahwa pers harus berperan dalam hal memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadikan dan kebenaran.

Melihat fungsi dan peran yang diemban Pers, memang menjadi sebuah kewajaran ketika publik berharap pada pers, untuk selalu mengungkap fakta kebenaran, sesuai dengan posisi fungsi dan peran pers, terutama kalangan masyarakat kritis. Tentu saja, harapan besar itu menjadi tugas dan tanggungjawab dunia pers, walaupun sangat berat. Terlebih, saat ini dunia pers sudah tersegmen pada pola industri media, yang tidak jarang lebih menekankan pada aspek kapitalisasi media. Bila melihat pada masa lalu Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, dunia pers memang menikmati kebebasan tersendiri. Kontrol pemerintah terhadap pers nyaris tidak ada. Kondisi yang sangat jauh berbeda dengan masa Soeharto berkuasa. Terlepas dari berbagai persoalan penilaian yang muncul, negatif maupun positif, yang jelas kehadiran media massa (pers), utamanya dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial, pendidikan dan hiburan tetap menjadi penting dalam mengawal kehidupan demokrasi di negeri ini. Tinggal bagaimana respon kalangan pers sendiri, mau tetap dengan idealisme media secara murni atau mengikuti trend yang muncul.

Proses Pemilu disebutkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, kedekataan para calon dan pendukungnya bersifat nyata . Sehingga dapat dipahami jika diprediksi bakal muncul persoalan dan sengketa dalam proses Pemilu. Pers massa dalam hal ini dapat menjadi salah satu faktor peredam atau pemicu sengketa. Dalam fungsinya

sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers massa diharapkan ikut menciptakan proses Pemilu yang adil, jujur, dan damai. Pers diharapkan menghasilkan karya jurnalistik yang selalu berpegang pada prinsip jurnalisme yang profesional dan beretika. Namun fungsi ideal pers tersebut seringkali hanya ada dalam teori atau harapan.

Agar bisa berperan optimal, pers harus memberi dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu sebagai alat legitimasi yang demokratis untuk memilih pemerintahan dan legislatif baru dukungan rakyat, dengan meningkatkan kepedulian publik terhadap pemilu. Pers musti terlibat secara kritis ikut "menguji" calon-calon legeslatif dan eksekutif yang terbaik, dengan memberikan gambaran yang lengkap, seimbang, dan akurat tentang calon-calon tersebut —dengan tetap bersikap independen. Ada puluhan partai, ribuan caleg, dan kemungkinan beberapa pasang capres-cawapres yang bersaing dalam pemilu, pers wajib memaparkan yang baik dan yang buruk untuk membantu pemilih membuat keputusan. Pers juga musti menyebarkan berbagai informasi terinci yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Masyarakat harus diberitahu bahwa pemilu bersifat rahasia, tak seorangpun boleh tahu apa pilihan seseorang. Pers musti memberikan penilaian seimbang dan adil bagi semua peserta pemilu. Jurnalis jangan bertindak seperti peramal cuaca yang mengabarkan spekulasi partai mana atau siapa yang akan menang dalam pemilihan. Cukup laporkan dengan akurat apa yang terjadi atau siapa yang berbuat dan berbicara. Laporkan praktek-praktek *money politic* atau upaya manipulasi lainnya. Jurnalis seharusnya waspada dengan komentar atau pandangan yang berpotensi mengadu domba, memecah-belah, atau membingungkan masyarakat pemilih. Potensi sengketa hingga benturan kekerasan antara peserta pemilu atau pendukungnya selalu ada, pers seharusnya sensitif untuk tidak gegabah mengangkat isu atau informasi yang berpotensi memicu konflik.

3. Analisa Mengenai Media Sebagai Fungsi Kontrol

Kenyataan menunjukkan, media sering menjadi alat kekuasaan penguasa atau pengusaha. Oleh penguasa, media digunakan sebagai alat propaganda, penetrasi budaya, dan sosialisasi tentang penyelenggaraan kekuasaan politik, sehingga tidak heran kerja sama kepentingan politik sering terjadi antara elite politik dengan organisasi kepemilikan media massa. Kolaborasi ini untuk membangun struktur masyarakat, sebagaimana yang mereka inginkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan.

Kenyataan ini terjadi di seluruh dunia. Hanya perwujudannya berbeda. Di negara otariter atau negara junta militer kegiatan media massa di bawah todongan senjata. Sedangkan di negara demokratis pemilik media massa turut serta dalam penentuan kebijakan kekuasaan politik. Di Indonesia, misalnya, saat ini terjadi kolaborasi antara penyelenggaraan kekuasaan politik dengan pemilik media, sehingga tidak heran jika pemilik media massa menjadi pengurus partai politik tertentu. Bahkan pemilik media massa juga memegang kekuasaan politik, seperti menteri. Selain itu, media massa boleh menjadi pendukung suatu partai atau kandindat pemegang kekuasaan politik. Pesan yang disajikan cenderung menumbuhkan citra positif dari program partai atau kandidat.

Dalam konteks komunikasi hal ini dikenal sebagai agenda setting. Media massa mempunyai agenda tertentu dalam menyajikan pesan, baik dari sudut kuantitatif yaitu frekuensi , maupun dari sudut kualitatif, seperti, pendalaman dan penekanan materi pesan.

Demikian pula dalm pemberitaan dalam pemberitaan Harian Kalteng Post, keberadaanya dalam pileg di Karisidenan Palangka Raya membawa dampak pada orientasi pemilih sesuai dengan pemberitaan yang ada di dalamnya. Selain sebagai media kampanye Kalteng Postjuga menyoroti hal terkait dengan pemilu, seperti pemberitaan terkait dengan keadaan logistik ataupun permasalahan DPT. Dalam hal ini Kalteng Postjuga melakukan fungsi kontrolnya. Berita yang menyangkut pelaksanaan pemilu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab atas keberadaanya sebagai saluran informasi pada masyarakat agar masyarakat mampu memberikan umpan balik berupa reaksi atau tanggapan atas pemberitaan. Seperti halnya pemberitaan tentang DPT diharapkan masyarakat pada akhirnya mengerti dan ikut berpartisipasi memperbaiki dan memperbaharui data yang ada pada KPU.

Kesimpulan dan Saran

Keberadaan media masa terutama media cetak sangat penting di dalam pelaksanaan pemilu mengingat bahwa pers memiliki beberapa fungsi pokok diantaranya sebagai sebuah sumber informasi serta pembelajaran bagi masyarakat.Peran aktif ini ditunjukan dengan pemuatan berita baik itu advetorial mengenai calon ataupun pemberitaan mengenai perkembangan kondisi lapangan pemilu 2019.

Peran media sebagai saran kampanye hanya dimanfaatkan oleh beberapa partai besar saja seperti PDIP, PAN, Partai Demokrat, dan Golkar. Sedang kan partai partai kecil kurang bahkan tidak ada samasekali yang memasang iklan atau memberitakan kampanye dalam Surat Kabar Kalteng Post. Kampanye ini lebih pada bentuk pemberitaan tidak dalam bentuk iklan. Pemberitaan mengenai calon atau proses kampanye labih mendominasi pemberitaan pemilu.

Sebagai sebuah sumber informasi Kalteng Post mampu memberikan informasi bukan hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada seluruh bagian yang berkepentingan kepada dalam pemilu 2019

Jalanya sosial learning pada masyarakat melalui media masa memang berjalan, dengan adanya pemberitaan penuh mengenai Pemilu, baik itu pemberitaan tentang aspek pelanggaran atau pemberitaan terkait dengan jalanya persiapan pelaksanaan pemilu. Namun keberhasilanya belum bisa dikatakan berhasil sebab tidak adanya pemberitaan mengenai proaktif masyarakat didalam menyikapi pemilu seperti tindakan masyarakat menyikapi DPT.

Berjalanya pemilu 2019 dengan sukses merupakan gambaran bahwa *social learning* telah dijalankan. Namun hal ini masih memiliki beberapa kekuarangan baik dalam segi penyampaian ataupun proses dari *sosial learning* itu sendiri. Oleh karena itu muncul beberapa saran dalam pelaksanaan *Sosial Learning*:

Referensi

Bandura, Albert, Ross, Dorothea, & Ross, Sheila A. 1961. Transmission of aggressions through imitation of aggressive models. *Journal of*

Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582

Bandura, A. 1960. Relationship of family patterns to behavior disorders. Stanford University.

Bandura, A, Huston, Aletha C. 1961. *Identification as a process of incidental learning.* J. abnorm. soc. Psychol.

Bandura,A, Walters H.1959. *Adolescent aggrersion.* New York: Ronald.

Faisal. 1989. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasinya.* Jakarta : Rajawali Press.

Djanaid, Djanalis. 1991. *Public Relation Dalam Teori dan Praktek*. Malang: Indopurels Training

Djanaid, Djanalis. 1991. *Public Relation Dalam Teori dan Praktek*. Malang: Indopurels Training

Harris, Sumadiria. 2005. *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Haryatmoko. 2007. Etika Komunikasi. Yogyakarta: Kanisius

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan penelitian*. Malang: UMM Press

Kartono, Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Maswadi, Rauf. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia

Moleong, J. Lexi. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaka Rhosdakarya

Moore, Fraizer. 1988. *Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus, dan Masalah 1*. Jakarta: Gresco

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Eresco.

Nurudin. 2002. Komunikasi Propaganda. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Rakhmad.1999. *Peran Media Massa Terhadap Sosial Learning Masyaraka*. Universitas Brawijaya: Skripsi tidak dipublikasikan

Ruslan, Rosady. 2003. *Managemen Public Relation & Media Komunikasi, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasinya;* Malang: YA3.

Sudibyo, Agus. 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacan.* Yogyakarta: LkiS.

Tribuana, Said. 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila.* Jakarta: CV Haji Masagung.

Undang- Undang nomor 40 tahun 1999.

Undang- Undang nomor 25 tahun 2008.